

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun ke depan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029, dalam upaya mendukung Visi Misi Kepala Daerah **“MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI”**.

Kami menyadari bahwa tersusunnya Renstra ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak, baik perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, maupun seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam proses penyusunan dokumen ini.

Semoga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang maju, harmonis, demokratis, dan berdaya saing.

Kuala Tungkal,

2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701201 199009 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	8
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.5. Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	23
2.6. Mitra Kerja Badan Kesatuan Bangsa dalam pemberian pelayanan	24
2.7. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
BAB III	38
3.1. Tujuan Renstra Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat Tahun 2025-2029	38
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	37
3.3. Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat 2025-2029	40
3.4. Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029	47
3.5. Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029	49
BAB IV	52
4.1. Uraian Program.....	52
4.2. Uraian Kegiatan	54
BAB V	111

DAFTAR TABEL



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat dan akurat, maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik. Sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang–Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan baik di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat .

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan terbitnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selanjutnya diturunkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengamanatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat Badan Kesbang Pol sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) dibawah Bupati Tanjung Jabung Barat yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Oleh karena itu, dalam rangka mensinergikan program dan kegiatan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menyesuaikan indikator dan target pembangunan 5 (lima) tahun (2025-2029). Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2026. Hal tersebut diatas merupakan suatu bentuk upaya nyata dalam melaksanakan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat . yaitu : “ ***Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat “Berkah Madani” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius , Kompetitif, Aman dan Harmonis–Mandiri dan berinovasi)***“, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama misi ke 2 (dua) yaitu : Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan Demokratis ;

1.2. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2026 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Di daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan , Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah , dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
30. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah penyesuaian indikator dan target kinerja dalam rangka menjabarkan visi dan misi Bupati Tanjung Jabung Barat ke dalam target dan sasaran OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan atau rencana kerja OPD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2025-2029

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik secara sistematis, sinergis, terpadu dan berkesinambungan;

- 2) Mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 3) Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 5) Menjadi tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab I memuat

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan .

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dan
 - b. Isu Strategis

Bab III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Bab III memuat
	1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
	2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
	3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, dan
	4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
Bab IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
	Bab IV memuat
	1. Uraian Program
	2. Uraian Kegiatan
	3. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
	4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
	5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan
	6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Bab V	PENUTUP
	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan SKPD yang menangani urusan Pemerintahan Umum yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan politik yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Tanjung Jabung Barat di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrtris Daerah, bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kabupaten

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya, Pembinaan dan Pemberdayaan

Organisasi Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan kehidupan demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
6. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tipologi

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang
2. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :

- a. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit pelaksana teknis.

Sekretariat

- a. Sekretariat Badan bertugas memberikan pelayanan administrative di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 1. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja.
 2. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi : Ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan Masyarakat, dan kearsipan.
 3. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi : perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 4. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
 5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- d. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai urai tugas pekerjaan:
 - 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian.
 - 2. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepanagkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
 - 3. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas dan penataan kearsipan.
 - 4. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana dan hubungan masyarakat.
 - 5. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset.
 - 6. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas.
- e. Subbagian program dan anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
- f. Subbagian program dan anggaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - 1. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup program dan anggaran.
 - 2. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran.

3. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja.
 4. Melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja.
 5. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program.
 6. Melakukan penyusunan laporan kinerja (LKJ), rencana strategis (Renstra), rencana kereja (Renja), perjanjian kinerja (PK). Infikator kinerja utama (IKU), dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).
1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - a. Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas badan kesatuan bangsa dan politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
 - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

5. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. Bidang Politik Dalam Negeri

- a. Bidang Politik Dalam Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
- b. Bidang Politik dalam Negeri dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.
 2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik.

5. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
 6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
- a. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.
 - b. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.
 2. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.

4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

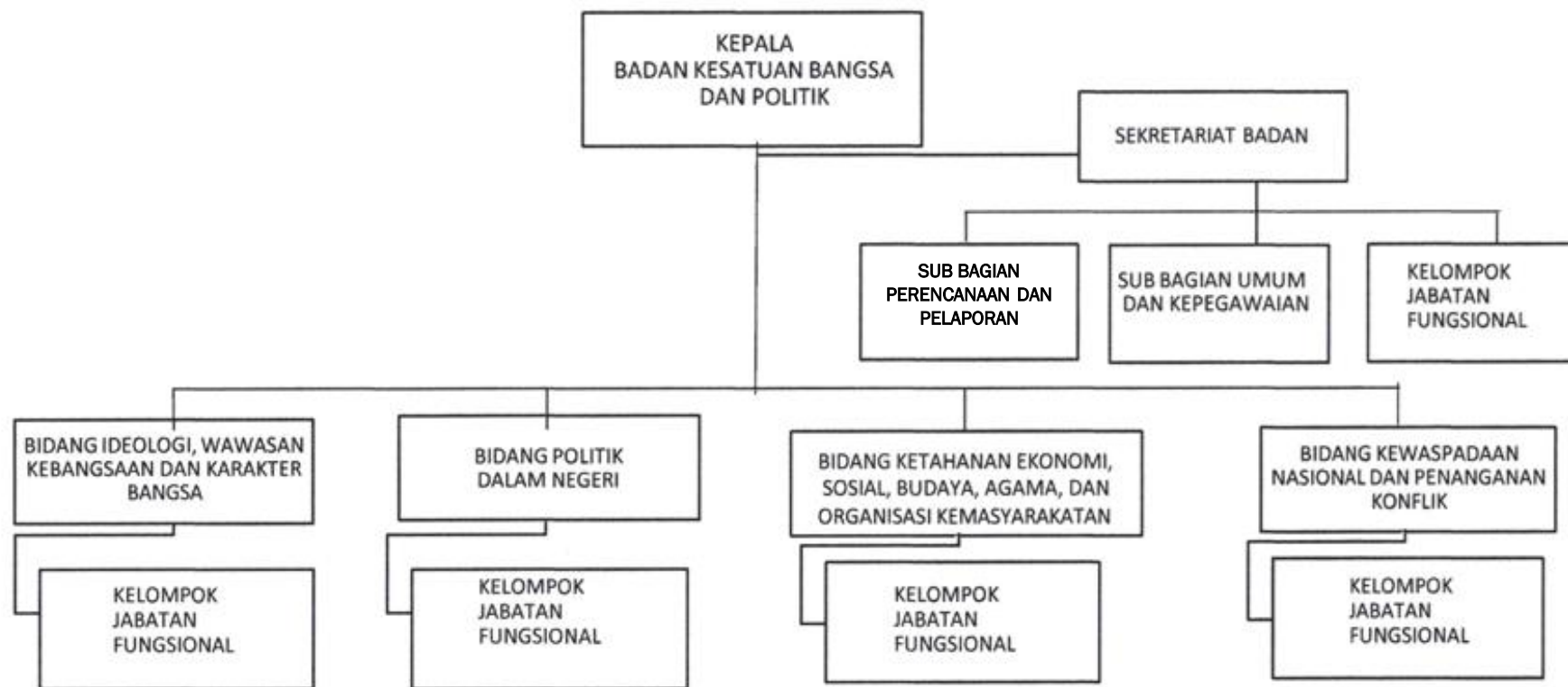
4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- a. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik
- b. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik.
 2. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik.

3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik.
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik.
5. Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik.
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

a) Jumlah dan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai dan status kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 36 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 19 (dua puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 5 (lima) orang PPPK dan 12 (dua belas) orang PPPK Paruh Waktu

Tabel 2.1
Pegawai Badan Kesbang dan Politik
Menurut Struktur

Bidang dan Bagian	Jumlah
Kepala Badan	1 orang
Sekretaris	1 Orang
1. Sub Bagian Program	1 Orang
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah	- Orang
3. Sub Bagian Umum Kepegawaian	1 Orang
Kepala Bidang Bina Ideologi, Wasbang	1 Orang
- Jabatan Fungsional	-
Kepala Bidang Bina Politik	1 Orang
- Jabatan Fungsional	-
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	1 Orang
- Jabatan Fungsional	-
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1 Orang
- Jabatan Fungsional	- Orang
PNS Staf Pelaksana	11 Orang
PPPK	5 orang
PPPK Paruh Waktu	12 Orang
Total	36 Orang

2.2.2. Aset OPD

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai aset, yang terdiri dari :

Tabel 2.2
Sarana Perlengkapan Kantor
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Tanjab Barat

No	Nama Perlengkapan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	6 unit
2	Kendaraan Roda 2	14 unit
3	Meja 1 Biro / Meja rapat	3 buah
4	Meja ½ Biro	41 buah
5	Kursi Kerja	30 buah
6	Kursi Putar	4 buah
7	Kursi Lipat	27 buah
8	Kursi Biasa	3 buah
9	Meja Panjang	2 buah
10	Lemari Buku Arsip	18 buah
11	Meja Komputer	8 buah
12	Gorden Jendela	8 buah
13	Dispenser	1 buah
14	Gambar Presiden / Warpres	1 set
15	Gambar Bupati / Wabup	1 set
16	Lambang Negara	1 buah
17	Bendera	1 buah
18	Wireless	1 buah
19	Sofa	1 buah
20	Tedmon Air	2 buah
21	Scanner	1 buah
22	Televisi LED 32"	1 buah
23	Genset	2 buah
24	Tangga Alumunium	1 unit
25	AC	12 buah
26	Kipas Angin Gantung	10 buah
27	Papan Data Besar	2 buah
28	Jam dinding	2 buah
29	Filing Kabinet	5 buah
30	Brankas	2 buah
31	Komputer / PC unit	10 unit
32	Laptop	6 unit
33	Infocus	1 buah
34	Printer	9 buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijabarkan dari 3 (tiga) aspek penilaian yang terdiri dari Kondusifitas wilayah, politik dan demokrasi ; serta pembinaan ormas, LSM dan OKP, dengan penjabaran sebagai berikut :

a) Kondusifitas wilayah

Secara umum situasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2021-2025 aman dan tertib. Meskipun sempat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana.

b) Politik dan Demokrasi

Kondisi politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta Pilkada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis .

Untuk dapat melihat jalannya demokrasi dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat selaku pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum . Tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat melalui tabel berikut .

Tabel 2.3.4
Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum
Kab. Tanjab Barat

No	Pemilihan Umum	Tahun Penyelenggaraan Pemilu	
		2020	2024
1.	Data Pilgub	67.82%	72.58%
2.	Data Pilbup	73.06%	72.30%
3.	Data Pilpres	-	81.49%
4.	Data Pileg	-	78%

Sumber : KPU Kab Tanjab Barat

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui kegiatan pendidikan politik sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.5
Pendidikan Politik Masyarakat
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kegiatan	Tahun Penyelenggaraan Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pendidikan politik bagi masyarakat	1 kali	1 kali	- kali	1 kali	2 kali
2.	Pemantapan pelaksanaan Pemilu	-	-	-	-	-
	Jumlah	1 kali	1 kali	- kali	1 kali	2 kali

Sumber : Badan Kesbangpol Kab Tanjab Barat

c) Pembinaan LSM, Ormas dan OKP

Dalam upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) , Organisasi Kemasyarakatan (LSM) , dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu Tahun 2021-2025 telah dilakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan maupun monitoring keberadaan dan aktivitas ormas yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.6
Pembinaan LSM, Ormas dan OKP
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Kegiatan	Tahun Penyelenggaraan Kegiatan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pembinaan dan peningkatan peran dan fungsi ormas dalam pembangunan	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali
2.	Monitoring Keberadaan dan AKtivitas Ormas LSM	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	Jumlah	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali	7 kali

Sumber : Badan Kesbang Pol Kab Tanjab Barat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Prangkat Daerah

1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

- Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan handal di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terpenuhi secara optimal ;
- Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi IT yang tersedia ;
- Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kurang dikenal masyarakat ;

b. Kondisi Eksternal

Tantangan yang berasal dari kondisi eksternal sebagai berikut :

- Potensi terjadinya konflik di masyarakat ;

2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

- Adanya kesamaan, keterkaitan / korelasi, dan keselarasan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “ Tanjung Jabung Barat Berkah 2024 (Berkualitas, ekonomi maju, religious, kompetitif, aman dan harmonis)”.

- Adanya peluang dukungan dana dari APBD maupun APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Adanya koordinasi yang baik di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jambi .
- Adanya wadah koordinasi antar lintas sektoral sampai kepada lintas ormas dan masyarakat

2.5. Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencakup berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa, serta stabilitas politik dan keamanan

1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab dalam Pembinaan, pendaftaran, pengawasan dan fasilitasi ormas.

2. Organisasi Masyarakat Asing (Ormas Asing)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengawasi dan memfasilitasi Ormas Asing yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Tokoh Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat melibatkan tokoh masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti dialog antar agama dan antar suku untuk menjaga kerukunan.

4. Kelompok Keagamaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat memfasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

5. Partai Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat memfasilitasi kegiatan partai politik dan pemantauan situasi politik.

6. Lembaga Pemerintah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya dalam berbagai urusan terkait politik dan keamanan.

7. Penyelenggara Pemilu

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk pemantauan situasi politik.

8. Masyarakat Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat melayani seluruh masyarakat dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menciptakan iklim politik yang kondusif.

Secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat melayani berbagai elemen masyarakat yang memiliki peran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta stabilitas politik dan keamanan.

2.6. Mitra Kerja Badan Kesatuan Bangsa dalam pemberian pelayanan

Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pemberian layanan merujuk pada berbagai organisasi dan kelompok masyarakat yang bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik, beberapa mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Ormas seringkali menjadi mitra strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam berbagai kegiatan seperti Pendidikan Politik, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pencegahan Konflik.

2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

FKDM dibentuk untuk membantu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjaga Kewaspadaan Dini terhadap potensi konflik dan gangguan keamanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

FPK berperan dalam memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan, serta menjadi wadah komunikasi dan kerjasama antar berbagai elemen masyarakat.

4. Partai Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerja sama dengan partai politik dalam berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi politik dan pemilu.

5. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan informasi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta membantu dalam menyelesaikan potensi konflik di masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada mitra-mitra tersebut agar dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa.

2. 7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesbangpol merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, ketahanan nasional, serta koordinasi antar unsur pemerintahan dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih ditemukan berbagai permasalahan pelayanan yang dapat menghambat efektivitas kinerjanya. Beberapa permasalahan yang umum terjadi antara lain:

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Jumlah pegawai yang terbatas dan tidak merata dalam kompetensi menyebabkan pelayanan tidak maksimal.
- Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur, khususnya dalam bidang teknologi informasi, analisis kebijakan, dan pemetaan konflik sosial.

Rendahnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Belum maksimalnya digitalisasi layanan, seperti pelayanan pendaftaran organisasi masyarakat (ormas), izin kegiatan, dan konsultasi kebangsaan.
- Akses informasi publik melalui website resmi kurang aktif dan tidak ter-update.

Koordinasi Antar Lembaga yang Lemah

- Koordinasi antara Kesbangpol dengan instansi lain seperti TNI, Polri, Satpol PP, dan Kecamatan tidak berjalan efektif, khususnya dalam penanganan potensi konflik sosial dan kegiatan ormas.
- Kurangnya forum komunikasi yang rutin antar unsur pemerintahan dan masyarakat.

Minimnya Anggaran Operasional

- Keterbatasan dana menghambat pelaksanaan program-program strategis seperti pendidikan politik, penguatan wawasan kebangsaan, dan pengawasan ormas.
- Program yang dirancang seringkali tidak terlaksana secara optimal karena keterbatasan biaya.

Kurangnya Sosialisasi Layanan kepada Masyarakat

- Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui jenis-jenis layanan yang dapat diakses melalui Badan Kesbangpol.
- Minimnya kegiatan penyuluhan, diseminasi informasi, dan media publikasi menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat.

Ketidakterpaduan Data dan Informasi

- Basis data tentang ormas, partai politik, dan potensi konflik belum terintegrasi secara baik, sehingga menyulitkan pengambilan kebijakan yang tepat dan cepat.
- Lemahnya sistem pelaporan dan dokumentasi kegiatan.

Permasalahan pelayanan di Badan Kesbangpol pada umumnya berkaitan dengan aspek SDM, sistem kerja, teknologi, koordinasi, anggaran, dan komunikasi publik. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, dibutuhkan reformasi birokrasi yang menyeluruh, peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan, serta penguatan peran Kesbangpol sebagai penjaga stabilitas sosial dan politik daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perangkat pemerintah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, ketahanan ideologi, serta integrasi sosial di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dalam menjalankan fungsinya, Kesbangpol perlu memiliki strategi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman. Untuk merumuskan strategi tersebut, dilakukan analisa SWOT guna mengidentifikasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang dihadapi.

Berikut adalah **uraian analisa SWOT** (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terkait strategi **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)** Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

Strengths (Kekuatan)

1. Kelembagaan yang resmi dan strategis:

- Kesbangpol berada di bawah pemerintah, memiliki legitimasi dalam koordinasi lintas sektoral, termasuk TNI, Polri, dan instansi lain.

2. Peran sentral dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan:

- Memiliki kewenangan dalam pemantauan organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan isu-isu strategis nasional.

3. Penguasaan data strategis dan intelijen sosial-politik:

- Memiliki jaringan dan sistem informasi untuk memantau dinamika sosial, politik, dan ideologi masyarakat.

Strengths (Kekuatan)

4. Kelembagaan yang resmi dan strategis:

- Kesbangpol berada di bawah pemerintah, memiliki legitimasi dalam koordinasi lintas sektoral, termasuk TNI, Polri, dan instansi lain.

5. Peran sentral dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan:

- Memiliki kewenangan dalam pemantauan organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan isu-isu strategis nasional.

6. Penguasaan data strategis dan intelijen sosial-politik:

- Memiliki jaringan dan sistem informasi untuk memantau dinamika sosial, politik, dan ideologi masyarakat.

7. Kemitraan luas:

- Dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ormas dalam membina wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila.

Weaknesses (Kelemahan)

1. Sumber daya manusia (SDM) terbatas:

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum merata, terutama dalam kemampuan analisa dan teknologi informasi.

2. Anggaran terbatas:

- Kegiatan strategis sering terkendala dana, sehingga program pembinaan masyarakat tidak optimal.

3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi:

- Masih belum maksimal dalam digitalisasi data, pengawasan ormas, atau diseminasi wawasan kebangsaan secara online.

4. Koordinasi lintas sektor belum optimal:

- Terkadang terjadi tumpang tindih atau komunikasi yang tidak sinkron antar lembaga.

Opportunities (Peluang)

1. Kesadaran publik terhadap pentingnya stabilitas nasional:

- Isu radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi membuka peluang bagi Kesbangpol untuk memperkuat peran pembinaan ideologi.

2. Kemajuan teknologi informasi:

- Dapat digunakan untuk penguatan sistem deteksi dini, pemantauan ormas, serta edukasi masyarakat.

3. Dukungan kebijakan pusat terhadap deradikalisasi dan penguatan wawasan kebangsaan:

- Program nasional seperti bela negara, revolusi mental, dan PIPAS (Pembinaan Ideologi Pancasila) dapat didukung dan disinergikan oleh Kesbangpol.

4. Kolaborasi dengan akademisi, LSM, dan media:

- Memberikan ruang untuk penguatan strategi komunikasi dan diseminasi informasi.

Threats (Ancaman)

1. Radikalisme dan intoleransi yang terus berkembang:

- Tantangan serius dalam menjaga kebhinekaan dan ideologi negara.

2. Informasi hoaks dan disinformasi politik:

- Menyulitkan masyarakat dalam menyaring kebenaran, serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi.

3. Polarisasi politik menjelang pemilu:

- Dapat memperkeruh stabilitas sosial dan meningkatkan potensi konflik horizontal.

4. Kurangnya partisipasi generasi muda dalam kehidupan kebangsaan:

- Minimnya keterlibatan pemuda dalam politik dan kebangsaan dapat mengurangi kesinambungan ideologi Pancasila.

Tabel
Matrik SWOT Identifikasi Alternatif Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Faktor Internal/Eksternal	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Strengths (Kekuatan)	Strategi SO (Strengths – Opportunities): 1. Meningkatkan peran Kesbangpol sebagai pusat edukasi ideologi Pancasila melalui pemanfaatan teknologi digital. 2. Mengembangkan sistem informasi politik dan ormas berbasis digital untuk deteksi dini konflik sosial. 3. Menjalin kemitraan dengan akademisi, tokoh masyarakat, dan media untuk memperluas jangkauan pembinaan kebangsaan.	Strategi ST (Strengths – Threats): 1. Memperkuat fungsi intelijen sosial-politik dan pengawasan ormas guna mencegah penyebaran radikalisme dan hoaks. 2. Meningkatkan sinergi dengan TNI/Polri dan instansi vertikal dalam menjaga stabilitas politik menjelang pemilu. 3. Mengoptimalkan peran kelembagaan dalam meredam polarisasi politik dan konflik horizontal.
Weaknesses (Kelemahan)	Strategi WO (Weaknesses – Opportunities): 1. Melakukan peningkatan kapasitas SDM Kesbangpol melalui pelatihan dan transfer pengetahuan digital. 2. Mendorong modernisasi infrastruktur IT dengan memanfaatkan dukungan program nasional (e-Gov). 3. Mengusulkan program kolaboratif yang dapat menarik dukungan dana dari pusat atau donor.	Strategi WT (Weaknesses – Threats): 1. Menyusun roadmap penguatan kelembagaan untuk meningkatkan respons terhadap ancaman radikalisme dan disinformasi. 2. Membentuk tim khusus deteksi dini dengan pelatihan berkelanjutan. 3. Mengembangkan SOP penanganan konflik sosial dan radikalisme berbasis sinergi lintas sektor.

Berdasarkan hasil analisis tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Faktor Permasalahan
	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kurangnya Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai Pancasila di berbagai lapisan masyarakat terutama generasi muda Kurangnya Kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa mengakibatkan munculnya sikap apatis terhadap permasalahan kebangsaan	Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan integratif, mencakup pendidikan, budaya, lingkungan sosial, serta keteladanan dari para tokoh bangsa. Pemahaman yang Dangkal terhadap Sejarah dan Fungsi Pancasila, Akibatnya, Pancasila dianggap sekadar simbol negara, bukan sebagai landasan moral, etika, dan pemersatu yang hidup dalam praktik sehari-hari.
	Peningkatan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rendahnya kualitas etika politik, melemahnya budaya politik yang partisipatif, dan merosotnya kepercayaan publik terhadap proses politik	Minimnya Pendidikan Politik yang Mencerahkan Media Politik yang Kurang Objektif Menurunnya partisipasi politik masyarakat secara berkualitas
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kurangnya Sistem Pembinaan dan Pemberdayaan yang Terstruktur Minimnya Pengawasan terhadap Aktivitas Ormas Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas Internal Ormas Tumpang Tindih Regulasi dan Lemahnya Penegakan Hukum	Pemberdayaan dan pengawasan Ormas bukan hanya soal teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan pendekatan politik, kapasitas kelembagaan, hingga pemahaman ideologis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi sistemik dalam pembinaan Ormas, penyusunan regulasi yang jelas, serta penguatan peran serta masyarakat sipil dalam pengawasan

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Faktor Permasalahan
	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Dalam bidang ekonomi, kesenjangan sosial, ketergantungan terhadap impor, serta lemahnya pemberdayaan UMKM menunjukkan belum kuatnya fondasi ekonomi nasional Di bidang sosial, rendahnya solidaritas, meningkatnya intoleransi, serta minimnya partisipasi masyarakat menandakan rapuhnya kohesi sosial. Dalam aspek budaya, budaya lokal mulai terpinggirkan oleh arus globalisasi, dan pelestarian warisan budaya belum berjalan optimal.	Ketimpangan ekonomi dan akses sumber daya yang tidak merata antara wilayah dan kelompok masyarakat. Ketergantungan ekonomi pada sektor primer dan impor, mengurangi kemandirian nasional. Rendahnya kapasitas dan daya saing pelaku UMKM serta minimnya inovasi ekonomi. Menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya konflik berbasis identitas akibat kurangnya pendidikan nilai kebangsaan dan toleransi. Kesenjangan sosial dalam akses pendidikan dan pelayanan publik, memperlebar jurang ketidaksetaraan. Tergesernya budaya lokal oleh budaya asing, terutama di kalangan generasi muda. Minimnya pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya sebagai aset pembangunan.

No	Bidang Urusan	Permasalahan	Faktor Permasalahan
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan, serta fasilitas penanganan konflik yang belum memadai	Koordinasi antar lembaga yang kurang efektif dalam penanganan konflik dan kewaspadaan. Keterbatasan sumber daya manusia terlatih di bidang deteksi dini dan resolusi konflik. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan meredam konflik. Fasilitas dan sarana penanganan konflik yang belum memadai, terutama di daerah rawan. Pendekatan penanganan konflik yang kurang mengakomodasi kearifan lokal dan budaya setempat.

'b. Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung stabilitas sosial-politik di daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam membina wawasan kebangsaan, menjaga ketahanan ideologi negara, serta memfasilitasi kehidupan demokrasi melalui penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memegang peran vital dalam menjaga keutuhan, keamanan, dan stabilitas nasional melalui penguatan kesatuan bangsa dan pengelolaan dinamika politik. Dalam menghadapi perkembangan situasi nasional dan global yang semakin kompleks, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama Kesbangpol sebagai berikut :

1. **4Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan** menjadi tantangan utama di tengah maraknya ideologi radikal, intoleransi, dan rendahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda. Kesbangpol dituntut untuk meningkatkan efektivitas program sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan agar nilai-nilai Pancasila tetap menjadi perekat dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Dalam ranah politik, Kesbangpol menghadapi tantangan dalam **meningkatkan kualitas demokrasi dan budaya politik yang sehat**. Rendahnya etika politik, merosotnya kepercayaan publik terhadap institusi politik, dan maraknya politik identitas menjadi permasalahan yang perlu diatasi melalui pendidikan politik dan fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan.
3. Kesbangpol dihadapkan pada tantangan dalam **pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (Ormas)**. Kurangnya pembinaan yang terstruktur dan pengawasan yang efektif menyebabkan munculnya Ormas yang berpotensi menyebarkan paham radikal atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila.
4. **penguatan ketahanan sosial dan pengelolaan keberagaman masyarakat** merupakan isu penting. Kesbangpol harus mampu mengantisipasi potensi konflik sosial akibat perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga toleransi dan kerukunan. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional juga menjadi prioritas.
5. **peningkatan kewaspadaan nasional dan kemampuan penanganan konflik** menjadi prioritas strategis. Kesbangpol harus memperkuat sistem deteksi dini, mediasi, dan resolusi konflik serta mengembangkan kerja sama lintas sektor agar potensi konflik dapat dikelola secara efektif dan tidak berkembang menjadi kerusuhan yang meluas.

Isu-isu strategis ini menuntut Kesbangpol untuk berperan secara aktif dan inovatif dalam mengawal stabilitas nasional, melalui penguatan sinergi dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Dengan

demikian, Kesbangpol dapat mewujudkan visi dan misinya sebagai garda terdepan dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Tabel Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan OPD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Global	Isu Lingkungan Dinamis Nasional	Isu Lingkungan Dinamis Regional	Isu Strategis yang di Tetapkan
1	2	3	4	5	6	7
Keanekaragaman atau heterogenitas etnis, agama, suku, budaya/kultur dan kondisi geografis.	Penurunan kesadaran masyarakat terhadap bela negara, yang ditandai dengan merosotnya pemahaman dan pengamalan empat pilar kebangsaan	Menimbulkan keretakan sosial, disintegrasi bangsa, dan konflik horizontal , yang berdampak pada menurunnya kualitas ketahanan sosial budaya serta stabilitas pembangunan berkelanjutan.	Pendidikan, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat harus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan global dan ancaman terhadap keamanan nasional.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bela negara	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat yang sadar akan pentingnya bela negara akan lebih aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung keamanan dan pertahanan negara.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam bela negara.
	Rendahnya kesadaran politik, kurangnya pendidikan politik, dan terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik	Menghambat proses demokratisasi dan melemahkan legitimasi pemerintahan, yang pada gilirannya berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan .	Tantangan dan ancaman geopolitik global yang membawa pengaruh pada nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan bernegara	Partisipasi masyarakat dalam proses politik, khususnya pemilu dan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis	Tingkat partisipasi masyarakat yang fluktuatif, adanya potensi kecurangan, dan polarisasi politik.	Kesadaran masyarakat dalam proses politik, pemilu dan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.
	Rendahnya wawasan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.	Keterbatasan wawasan dan keterampilan masyarakat menghambat upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta pencapaian keadilan sosial dan ekonomi.	Menjaga Keberagaman budaya, agama, dan suku merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan karena dapat menjadi sumber inovasi, kreativitas, dan integrasi nasional	Mendorong nilai-nilai moderasi beragama dan menghargai perbedaan antar suku, agama, dan budaya.	Peningkatan toleransi, kesadaran akan keberagaman, pengembangan potensi daerah	Menjaga keberagaman budaya, agama, dan suku dan Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan OPD	Permasalahan OPD	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Global	Isu Lingkungan Dinamis Nasional	Isu Lingkungan Dinamis Regional	Isu Strategis yang di Tetapkan
1	2	3	4	5	6	7
Keanekaragaman atau heterogenitas etnis, agama, suku, budaya/kultur dan kondisi geografis.	Kurangnya kesadaran fungsi profesionalisme dan indenpedensi Ormas, serta rendahnya tingkat pelaporan kegiatan dan perpanjangan SKT Ormas.	Ketidaktertiban administrasi dan lemahnya profesionalisme Ormas dapat memunculkan potensi konflik, penyalahgunaan fungsi sosial, serta menghambat terciptanya iklim demokrasi dan kolaborasi yang sehat.	Ormas dapat mendukung perdamaian dunia, seperti dialog antar agama, penyelesaian konflik, dan pengembangan budaya damai.	Peran Ormas dalam pembangunan dan persatuan bangsa, serta upaya menjaga ketertiban dan keamanan sosial.	peningkatan peran dan kemandirian Ormas dalam pembangunan	Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.
	Terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia), anggaran, dan sarana prasarana dapat menghambat upaya Kesbangpol dalam menjalankan fungsi penanganan konflik	Terbatasnya kapasitas dan fasilitas mengurangi kemampuan untuk mencegah dan merespons potensi konflik secara cepat dan efektif.	Menjaga perdamaian, mengatasi ancaman, dan membangun hubungan baik antar negara	Mencegah konflik dan menjaga kondusivitas antar masyarakat secara nasional.	Memelihara Perdamaian, menghindari perkelahian, dan meningkatkan rasa aman serta damai di antara berbagai kelompok masyarakat.	Mencegah konflik dan menjaga kondusifitas antar masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Kesbangpol Kab. Tanjab Barat Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis . Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan , program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2025-2029 menetapkan tujuan sebagai berikut “ ***Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM*** “ .

Tujuan ini menjadi landasan dalam perumusan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta arah kebijakan dan program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja Badan Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang kesatuan bangsa, ideologi negara, politik dalam negeri, dan ketahanan nasional.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat telah menetapkan Visi dan Misinya selama 5 (lima) Tahun ke depan (2025-2029) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visinya Adalah **Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI**

Untuk mencapai dan mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menetapkan 3 (tiga) Misi pembangunan daerah tahun 2025 – 2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam Misi ke 1, yaitu:

- 1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif**
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam Tujuan Ke 2, yaitu

Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial

Kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif, dan memiliki daya tahan sosial merupakan prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ini mencerminkan orientasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membangun tatanan sosial yang damai, harmonis, responsif terhadap perubahan, serta tangguh menghadapi berbagai tantangan sosial maupun bencana.

Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat masuk dalam sasaran ke 3 pada Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu :

Meningkatnya ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.3 Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Kab.Tanjab Barat 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing) . Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2025-2029 ditetapkan sasaran – sasaran sebagai berikut :

a) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat;

Sasaran ini bertujuan untuk membangun karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, agar mampu menghadapi tantangan zaman dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kebangsaan, persatuan, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai demokrasi, platform partai politik, dan kesetaraan gender dalam politik bagi masyarakat luas termasuk pemilih pemula dan penyandang disabilitas;

Sasaran ini bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas, khususnya pemilih pemula dan penyandang disabilitas, mengenai nilai-nilai dasar demokrasi, platform partai politik, serta pentingnya kesetaraan gender dalam politik. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi interaktif, dan edukasi politik yang inklusif, masyarakat diharapkan mampu memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi politik yang lebih aktif, cerdas, dan setara tanpa diskriminasi, sehingga tercipta proses demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.

c) Meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, Agama dan budaya;

Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan harmonis melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, kehidupan sosial yang aman dan tertib, kerukunan antarumat beragama, serta pelestarian budaya lokal sebagai identitas dan kekuatan pemersatu bangsa.

d) Meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan, menjaga nilai-nilai persatuan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong peran aktif organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam mendukung pembangunan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

e) Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial;

untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi ancaman dan gangguan keamanan, serta meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial guna menjaga stabilitas, ketertiban, dan keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel
Penahapan Renstra PD

Sasaran	Tahap 1 (2025)	Tahap 2 (2026)	Tahap 3 (2027)	Tahap 4 (2028)	Tahap 9 (2029)
Meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat	Menyusun fondasi data, desain program, dan kelembagaan pelaksana	Menyiapkan SDM pelaksana dan membangun kesadaran awal generasi muda	Memperluas jangkauan program dan memperkuat partisipasi generasi muda	Menjadikan nilai Pancasila sebagai bagian dari sistem pembelajaran dan budaya lokal	Menyempurnakan dan melestarikan hasil, serta menyiapkan siklus strategis
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Partisipasi politik dan memperkuat Demokrasi untuk membangun masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab	Menyusun dasar kebijakan, data, dan strategi penguatan partisipasi politik yang tepat sasaran	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya demokrasi dan keterlibatan politik	Memberi ruang dan kemampuan nyata kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem politik	Menjaga iklim demokrasi yang terbuka, sehat, dan inklusif di tingkat akar rumput	Memastikan keberlanjutan dan peningkatan budaya demokrasi yang partisipatif dan bertanggung jawab
Meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, Agama dan budaya	Menyusun dasar data, peta kerawanan, dan dokumen strategi penguatan stabilitas lintas bidang	Membangun ketahanan sosial dan budaya serta meningkatkan peran lembaga lokal	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan memperkuat hubungan sosial lintas kelompok	Memastikan seluruh elemen masyarakat terlibat dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi-budaya-agama	Memastikan keberlanjutan hasil dan menyusun arah penguatan stabilitas ke depan

Sasaran	Tahap 1 (2025)	Tahap 2 (2026)	Tahap 3 (2027)	Tahap 4 (2028)	Tahap 9 (2029)
meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan, menjaga nilai-nilai persatuan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat	Membangun data akurat dan struktur legal ormas sebagai mitra potensial pembangunan	Meningkatkan kapasitas dan pemahaman ormas terhadap fungsi strategisnya	Mendorong partisipasi nyata ormas dalam mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat	Membangun kemitraan jangka panjang dan memperkuat kontribusi ormas dalam menjaga harmoni sosial	Memastikan keberlanjutan partisipasi ormas dalam pembangunan dan menjaga nilai persatuan secara strategis
	Menyusun basis data dan sistem deteksi dini berbasis wilayah serta koordinasi antar pemangku kepentingan	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pencegahan konflik dan menjaga persatuan	Meningkatkan kemampuan teknis dan koordinasi antar lembaga dalam menangani konflik secara cepat dan damai	Menjaga kesiapsiagaan daerah dan memperkuat struktur kelembagaan yang mendukung stabilitas sosial	Menjaga keberlanjutan dan memperluas dampak strategi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik ke masa depan

Tabel
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50%	71,42%	78.57%	85.71%	88%	100%
		Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai demokrasi, platform partai politik, dan kesetaraan gender dalam politik bagi masyarakat luas termasuk pemilih pemula dan penyandang disabilitas.	Persentase Pendidikan Politik pada kader Partai Politik	40%	50%	70%	80%	90%	100%

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, Agama dan budaya	Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan, menjaga nilai-nilai persatuan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	45%	65%	70%	80%	90%	100%

NSPK DAN SASARAN RPJM YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Kualitas Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik sosial yang di selesaikan	30%	50%	60%	70%	80%	100%

3.4 Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029

Dalam rangka mencapai tujuan “Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM” serta mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan lima strategi utama. Kesbangpol dapat berperan aktif dalam menjaga stabilitas politik, membina kehidupan demokrasi, dan memperkuat ketahanan nasional. Kelima strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila merupakan upaya untuk membangun bangsa yang kuat, berkarakter, dan berpersatuan, serta mampu menghadapi tantangan global di masa depan.

Strategi ini untuk pembinaan generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar program tahunan, tetapi merupakan pondasi peradaban bangsa. Dengan menanamkan nilai luhur seperti gotong royong, persatuan, toleransi, dan keadilan sejak dini, Indonesia akan memiliki generasi penerus yang berintegritas, berdaya saing, dan cinta tanah air.

2. Pembinaan kepada kelompok masyarakat, organisasi politik dan partai politik yang mendapatkan pembekalan pendidikan politik dan untuk memperkuat demokrasi, memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan menjamin hak-hak warga negara.

Strategi ini untuk pembinaan kelompok masyarakat, organisasi politik, dan partai politik melalui pendidikan politik adalah pilar penting dalam pembangunan demokrasi substansial. Dengan pendidikan politik yang merata dan berkualitas, masyarakat akan lebih mampu mengontrol kekuasaan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menjamin bahwa kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Pembinaan kepada masyarakat memahami pentingnya Kerukunan Umat Beragama dan penurunan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Strategi ini untuk pembinaan kepada masyarakat terkait kerukunan umat beragama dan pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan sehat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan seluruh lapisan masyarakat, tujuan ini dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

4. Pembinaan dan pengembangan Organisasi Masyarakat

Strategi ini untuk pembinaan dan pengembangan organisasi masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan tatanan sosial yang dinamis namun tertib, memperkuat demokrasi partisipatif, dan mencegah berkembangnya potensi konflik atau disintegrasi. Melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan ormas, akan tercipta kehidupan masyarakat yang sehat secara sosial, stabil secara politik, dan tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan.

5. Mengembangkan tim terpadu yang terdiri dari berbagai stakeholder, seperti pemerintah, kepolisian, TNI, dan tokoh masyarakat, untuk menangani potensi konflik dan memberikan fasilitasi dalam penyelesaian konflik sosial, seperti memberikan ruang dialog, mediator, dan pendampingan bagi pihak-pihak yang berselisih.

Strategi ini untuk pengembangan tim terpadu penanganan konflik sosial menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem penanganan konflik yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis dialog. Pendekatan ini tidak hanya menekan eskalasi konflik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan budaya damai di tengah masyarakat. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan kepercayaan antar semua pihak yang terlibat.

3.5 Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pencapaian tujuan ***“Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM”*** serta melaksanakan strategi yang telah dirumuskan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sejumlah arah kebijakan yang menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Arah kebijakan ini merupakan penjabaran lebih operasional dari strategi, dan disusun untuk memastikan bahwa sasaran strategis dapat dicapai secara terukur, efisien, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 terdiri dari:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kesbangpol berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di seluruh lapisan masyarakat sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan diarahkan pada pengembangan program sosialisasi, pendidikan ideologi, serta pembinaan karakter nasional yang berkelanjutan dan terintegrasi.

2. Peningkatan Kualitas Demokrasi dan Budaya Politik

Mendorong partisipasi politik yang sehat, etika politik yang tinggi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi melalui pendidikan politik, fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, dan pengawasan terhadap dinamika politik yang berpotensi mengganggu stabilitas.

3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Melaksanakan pembinaan yang terstruktur terhadap Ormas agar berperan positif dalam pembangunan nasional dan mencegah berkembangnya paham radikal atau tindakan inkonstitusional. Kebijakan juga menekankan pengawasan yang efektif serta transparansi aktivitas Ormas sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Penguatan Ketahanan Sosial dan Keberagaman

Mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan sinergi antar kelompok sosial. Kesbangpol fokus pada

pengelolaan keberagaman melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan, penyuluhan kerukunan antarumat beragama, dan pencegahan konflik sosial dengan pendekatan inklusif dan partisipatif.

5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Membangun sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi ancaman terhadap stabilitas nasional. Kesbangpol mengarahkan kebijakan pada peningkatan kapasitas mediasi, resolusi konflik, serta kolaborasi lintas sektoral dalam menangani berbagai bentuk konflik dan gangguan keamanan.

6. Penguatan Sinergi dan Kemitraan

Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, aparat keamanan, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media untuk menciptakan sinergi dalam menjaga ketahanan nasional dan memperkuat kesatuan bangsa.

Dengan arah kebijakan tersebut, Badan Kesbangpol diharapkan dapat menjalankan fungsi strategisnya secara efektif dan responsif terhadap dinamika perkembangan nasional dan global, serta berkontribusi nyata dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa.

Adapun penyelerasan arah kebijakan RPJMD yang selaras dengan tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Arah Kebijakan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
	Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Program Pendidikan dan sosialisasi Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI Memfasilitasi kegiatan pembinaan ideologi Pancasila secara berkesinambungan	Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan Landasan Pembentukan Karakter bangsa Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam pembentukan karakter generasi muda Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek

		Membangun Jejaring Kerja sama antar-instansi, TNI/Polri, Lembaga Pendidikan, dan Organisasi masyarakat Mengembangkan Sistem informasi dan jejaring komunikasi yang cepat dan responsive	kehidupan, mulai dari Pendidikan, keluarga, hingga lingkungan social Kerja sama lintas sektor yang sinergis, partisipatif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan sistem kolaboratif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui berbagai pendekatan kelembagaan dan kemasyarakatan. Mewujudkan sistem informasi dan komunikasi yang modern, adaptif, dan mampu mendukung respons cepat terhadap potensi ancaman ideologi, konflik sosial, dan dinamika politik, sehingga peran Kesbangpol dalam menjaga stabilitas nasional dapat dijalankan secara optimal.
--	--	---	---

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
	Urusan Pemerintahan Umum	Melaksanakan Pemetaan wilayah rawan konflik sosial	Tim terpadu akan bertindak cepat dan tepat ketika terjadi konflik, memberikan fasilitasi penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Tim ini akan memfasilitasi proses dialog, mediasi, dan pendampingan bagi pihak yang berselisih, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang damai dan adil. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran tim terpadu dan cara mencegah serta menyelesaikan konflik secara damai.

BAB IV

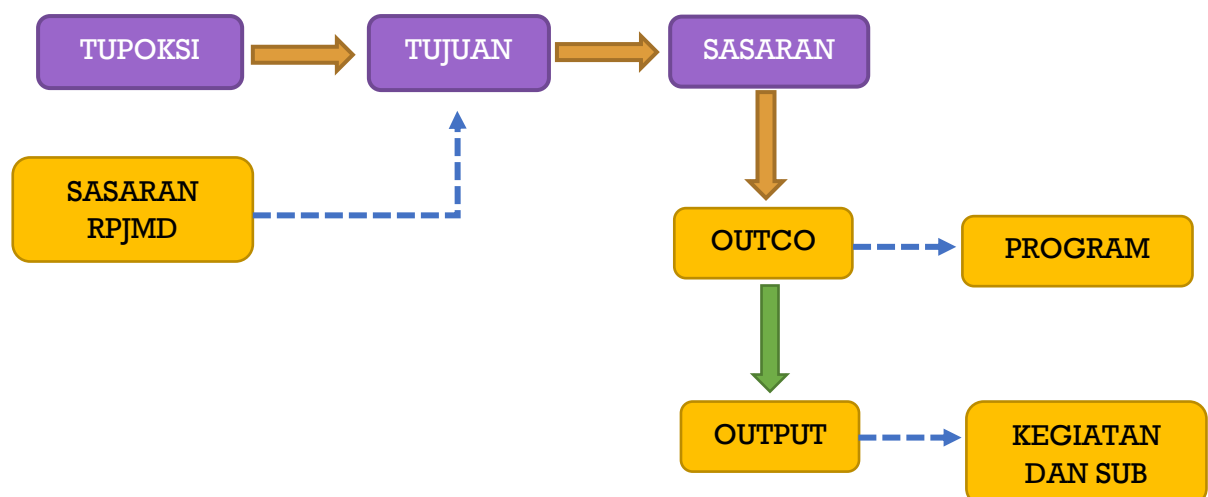
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penguatan demokrasi, penanggulangan konflik sosial, serta pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan partai politik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada stabilitas politik dan keamanan, serta peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, Badan Kesbangpol melaksanakan berbagai program prioritas. Program-program tersebut disusun berdasarkan isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta mengacu pada kebijakan nasional dan daerah.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Semua Program yang dirumuskan telah mengacu pada Nomenklatur resmi terkini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Pemutakhiran Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program Prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional dan daerah yang aman, damai, demokratis, serta berkeadaban, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan sejumlah program prioritas yang berfokus pada peningkatan ketahanan nasional, penguatan kehidupan politik yang sehat, serta pencegahan terhadap potensi konflik sosial dan ancaman disintegrasi bangsa.

Program prioritas ini disusun sebagai bentuk respons terhadap dinamika sosial politik yang berkembang, meningkatnya potensi konflik horizontal, penyebaran paham radikalisme dan intoleransi, serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, program-program ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan aparaturnya keamanan dalam menjaga stabilitas dan harmoni kehidupan berbangsa. Program Prioritas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Salah satu program prioritas yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam rangka memperkuat landasan ideologis dan identitas kebangsaan masyarakat Indonesia. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila secara utuh dan konsisten ke seluruh lapisan masyarakat, serta membentuk karakter bangsa yang toleran, nasionalis, dan berintegritas.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi melalui peran aktif partai politik dan lembaga pendidikan dalam menyemai pemahaman politik yang sehat, etis, dan berbudaya di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Program ini diarahkan untuk membangun kesadaran politik masyarakat secara cerdas dan bertanggung jawab, serta membentuk

budaya politik yang partisipatif, santun, dan menjunjung tinggi etika demokrasi, guna mendukung proses demokratisasi yang berkelanjutan.

3. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, guna memperkuat stabilitas nasional dan integrasi bangsa. Program ini berfokus pada upaya memperkuat daya tahan masyarakat terhadap pengaruh negatif, seperti disintegrasi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi budaya lokal, serta berkembangnya paham-paham intoleran yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Bertujuan untuk mewujudkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang tertib, aktif, berdaya guna, dan berkontribusi positif dalam pembangunan serta menjaga stabilitas kehidupan sosial-politik di masyarakat. Program ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu pemberdayaan ormas agar lebih profesional dan produktif, serta pengawasan ormas agar kegiatannya sejalan dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, norma sosial, atau ketertiban umum.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini, cegah dini, serta respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial, sekaligus membangun ketahanan nasional dari ancaman disintegrasi, radikalisme, intoleransi, dan instabilitas sosial. Program ini diarahkan untuk menciptakan daerah yang aman, harmonis, dan stabil melalui penguatan sistem kewaspadaan nasional yang terintegrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta masyarakat dalam meredam dan menyelesaikan konflik secara damai.

Program Penunjang Wajib (Non Prioritas)

Selain program-program prioritas strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu program yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan melalui penyediaan layanan manajerial, administratif, dan operasional. Program ini bersifat wajib dan dilaksanakan secara berkelanjutan karena menjadi fondasi teknis dan manajerial dalam mendukung seluruh program strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ruang lingkup program ini meliputi seluruh aspek pengelolaan internal perangkat daerah, yang terdiri atas:

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD), pengelolaan anggaran tahunan, serta evaluasi capaian kinerja melalui SIPD.
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
Meliputi pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas, dan pemrosesan pembayaran atas kegiatan Badan.
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Menangani urusan kepegawaian ASN seperti pengusulan formasi, kenaikan pangkat, disiplin pegawai, dan pengembangan SDM.
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Termasuk urusan surat-menyurat, pengarsipan, dokumentasi, serta pelaksanaan tugas kesekretariatan.
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Proses pengadaan barang dan jasa, baik fisik maupun non fisik, yang mendukung pelaksanaan kegiatan teknis maupun administrasi.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemberian dukungan jasa seperti tenaga kebersihan, pengamanan, operator komputer, dan layanan teknis pendukung lainnya.

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas, alat berat, jaringan listrik, dan perangkat kerja lainnya agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal.

Program atau kegiatan ini yang tidak termasuk dalam skala utama pembangunan atau tidak berdampak langsung terhadap target kinerja utama suatu instansi, daerah, atau lembaga. Meski begitu, program non prioritas tetap memiliki manfaat pendukung atau bersifat pelengkap.

4.2. Uraian Kegiatan

A. Uraian Kegiatan Prioritas

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan : *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*

Kegiatan ini bertujuan pemantapan pelaksanaan program-program yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, seperti cinta tanah air, toleransi, gotong royong, integritas, dan semangat persatuan. Melalui pelatihan, sosialisasi, advokasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk individu dan kelompok masyarakat yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Kegiatan : *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan*

Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan ini mendukung penguatan kapasitas dan tata kelola yang baik, mendorong transparansi, serta membangun sinergi antara lembaga perwakilan, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan pemilu dan pemilihan kepala daerah juga difasilitasi untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar, aman, jujur, dan adil.

3. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi antar-perangkat daerah dan lintas sektor, dengan melibatkan akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, komunitas budaya, serta elemen masyarakat lainnya. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program juga menjadi bagian penting dari kegiatan ini, guna memastikan kebijakan dan pelaksanaan program benar-benar berdampak pada peningkatan ketahanan masyarakat secara menyeluruh.

4. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tujuan dari kegiatan ini pengawasan terhadap Ormas dilakukan secara preventif dan persuasif, dengan mengedepankan pendekatan pembinaan dan dialog, tanpa mengabaikan prinsip ketertiban umum, hukum, dan hak asasi manusia. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas Ormas sejalan dengan tujuan nasional serta tidak mengarah pada tindakan intoleran, radikal, atau anti-Pancasila.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial.

Kegiatan : *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*

Kegiatan ini meliputi penyusunan peta rawan konflik, pemberian rekomendasi langkah antisipatif, serta pelaksanaan mediasi, rekonsiliasi, dan pemulihan pasca konflik. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada pencegahan (preventif), penanganan cepat (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang berbasis pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan kearifan lokal.

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sukegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor Terwujudnya program kegiatan dan rencana kerja perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase terlaksananya administrsai keuangan perangkat daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN Persentase tertatanya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sukegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Adminitrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik - Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sukegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
				Tersedianya kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan Tersedianya aset tetap lainnya	Terakomodirnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang disesuaikan Persentase tersedianya jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menurut Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kominikasi, Sumber Daya Air yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Aset Tetap lainnya - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sukegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya Kehidupan	Meningkatkan pemahaman	Meningkatnya Kesadaran	Menciptakan generasi muda yang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di Bayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	dan penghayatan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat	masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	cerdas, kreatif, inovatif dan berperilaku sesuai dengan Ideologi Pancasila Bangsa Indonesia	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya Jumlah aset tetap lainnya yang di pelihara jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara di rehabilitasi	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Aset Tetap lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sukegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						<i>Sub Kegiatan</i> 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaa, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3 Pembentukan Paskibraka 4 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 5 Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Pengangkatan 6 Purnapaskibraka Duta Pancasila	
		Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai demokrasi, platform partai politik, dan kesetaraan gender dalam politik bagi masyarakat luas termasuk pemilih pemula	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Lembaga pendidikan berperan penting dalam menciptakan warga negara yang sadar politik, beretika dan memiliki budaya politik yang sehat, sehingga masyarakat menjadi lebih maju dan demokrasi	Persentase Pendidikan Politik pada kader Partai Politik	<i>Program</i> Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik <i>Kegiatan</i>	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sukegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
		dan penyandang disabilitas				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu/Pilkada serta pemantauan situasi politik Sub Kegiatan 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/Pilkada serta Pemantauan situasi politik 2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/Pilkada serta Pemantauan situasi politik	
		Meningkatkan stabilitasi Ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Stabilitas sosial dan keberlanjutan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi	Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sukegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
					Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi kerukunan Umat beragama dan penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Sub Kegiatan 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi FUB dan Penghayat 2 Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi FUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
		Meningkatkan partisipasi Ormas dalam pembangunan, menjaga nilai-nilai persatuan dan mem berikan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Peningkatan Partisipasi masyarakat pelayanan yang lebih baik, pemeliharaan nilai-nilai dan peningkatan kapasitas kelembagaan ormas	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sukegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah 2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas evaluasi dan sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM	Menciptakan situasi yang kondusif dan aman bagi masyarakat	meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Peningkatan kesadaran akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam dialog dan komunikasi, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik antara berbagai kelompok dan individu	Persentase Konflik sosial yang di selesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sukegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional penanganan konflik sosial Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 2. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen , pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 3. Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah Kab/Kota	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan secara sistematis dan terukur. Penyusunan ini mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengintegrasikan capaian kinerja dalam kerangka waktu lima tahun (2025–2029).

Rencana sub kegiatan dirancang untuk mendukung pencapaian output dan outcome yang relevan dengan sasaran kinerja perangkat daerah, dengan indikator yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual, prioritas daerah, dan ketersediaan anggaran.

Tabel berikut menyajikan rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kinerja, target capaian tahunan, dan estimasi pendanaan selama periode Renstra tahun 2025–2029.

TABEL TC. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PERIODE 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8	UNSUR PEMERINT AHAN UMUM				16.428.50 0.000		16.688.50 0.000		18.387.50 0.000		17.890.00 0.000		18.365.00 0.000		18.365.00 0.000		106.106.5 00.000		
			8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjab Barat	100%	100%	16.428.50 0.000	100%	16.688.50 0.000	100%	18.387.50 0.000	100%	17.890.00 0.000	100%	18.365.00 0.000	100%	18.365.00 0.000	100%	106.106.5 00.000	Badan Kesbag pol	Kab. Tanjab Barat	
			8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kab / Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	100%	6.883.500 .000	100%	7.043.500 .000	100%	8.062.500 .000	100%	7.565.000 .000	100%	8.065.000 .000	100%	8.065.000 .000	100%	45.666.50 0.000	Badan Kesbag pol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.01.2.01	Perencana an, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya program kegiatan dan rencana kerja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	100%	100%	400.000.0 00	100%	400.000.0 00	100%	430.000.0 00	100%	430.000.0 00	100%	430.000.0 00	100%	430.000.0 00	100%	2.520.000. 000	Badan Kesbag pol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen Perencanaan an perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	7 dok	60.000.00 0	7 Dok	60.000.00 0	7 Dok	70.000.00 0	7 Dok	70.000.00 0	7 Dok	70.000.00 0	7 Dok	70.000.00 0	35 Dok	400.000.0 00	Badan Kesbagpol	Kab.Ta njab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dok	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	300.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dok	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	300.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dok	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	300.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dok	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	300.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasa ran OPD	Indik ator Sasar an	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	80.000.000	20 Laporan	460.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	80.000.000	4 Laporan	80.000.000	20 Laporan	460.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	4.790.000.000	100%	4.790.000.000	100%	4.800.000.000	100%	4.800.000.000	100%	4.800.000.000	100%	4.800.000.000	100%	28.780.000.000	Badan Kesbagpol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Org / Bulan	30 Org / Bulan	4.500.000.000	30 Org / Bulan	4.500.000.000	30 Org / Bulan	4.500.000.000	30 Org / Bulan	4.500.000.000	30 Org / Bulan	4.500.000.000	30 Org / Bulan	4.500.000.000	150 Org / Bulan	27.000.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	190.000.000	12 Dokumen	190.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	12 Dokumen	200.000.000	60 Dokumen	1.180.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	10 Laporan	300.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	36 Laporan	36 Laporan	50.000.000	36 Laporan	50.000.000	36 Laporan	50.000.000	36 Laporan	50.000.000	36 Laporan	50.000.000	36 Laporan	50.000.000	180 Laporan	300.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Badan Kesbangpol	100%	100%	385.000.000	100%	385.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	100%	410.000.000	100%	2.410.000.000	Badan Kesbagpol	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasa ran OPD	Indik ator Sasar an	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	55 Paket 30.000.000	55 Paket 30.000.000	55 Paket 30.000.000	55 Paket 35.000.000	55 Paket 35.000.000	55 Paket 35.000.000	55 Paket 35.000.000	55 Paket 35.000.000	55 Paket 35.000.000	55 Paket 35.000.000	275 paket 200.000.000	200.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat		
			8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen 25.000.000	2 Dokumen 25.000.000	2 Dokumen 30.000.000	2 Dokumen 30.000.000	2 Dokumen 30.000.000	2 Dokumen 30.000.000	2 Dokumen 30.000.000	2 Dokumen 30.000.000	10 Dokumen 170.000.000	170.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat				
			8.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaa n Sistem Informasi Kepegawai an	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen 25.000.000	4 Dokumen 25.000.000	4 Dokumen 30.000.000	4 Dokumen 30.000.000	4 Dokumen 30.000.000	4 Dokumen 30.000.000	4 Dokumen 30.000.000	20 Dokumen 170.000.000	170.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat					
			8.01.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen 25.000.000	12 Dokumen 25.000.000	12 Dokumen 35.000.000	12 Dokumen 35.000.000	12 Dokumen 35.000.000	12 Dokumen 35.000.000	60 Dokumen 190.000.000	190.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat						
			8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 Orang	5 orang 50.000.000	5 orang 50.000.000	5 orang 50.000.000	5 orang 50.000.000	5 orang 50.000.000	5 orang 50.000.000	25 orang 300.000.000	300.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat						

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	50 orang	100 orang	180.000.000	100 orang	180.000.000	100 orang	180.000.000	100 orang	180.000.000	100 orang	180.000.000	100 orang	180.000.000	450 orang	1.080.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU	3 Orang	5 orang	50.000.000	5 orang	50.000.000	5 orang	50.000.000	5 orang	50.000.000	5 orang	50.000.000	5 orang	50.000.000	25 orang	300.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	867.000.000	100%	892.000.000	100%	905.000.000	100%	905.000.000	100%	905.000.000	100%	905.000.000	100%	5.361.000.000	Badan Kesbagpol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penarangan Bangunan Kantor Yang disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000	12 Paket	7.000.000	12 Paket	8.000.000	12 Paket	8.000.000	12 Paket	8.000.000	12 Paket	8.000.000	60 Paket	46.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	60.000.000	12 Paket	60.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	70.000.000	60 Paket	400.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasa ran OPD	Indik ator Sasar an	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	12 Paket	12 Paket	18.000.00 0	12 Paket	18.000.00 0	12 Paket	20.000.00 0	12 Paket	20.000.00 0	12 Paket	20.000.00 0	12 Paket	20.000.00 0	60 Paket	98.000.00 0	Badan Kesbagp ol	Kab.Ta njab Barat
			8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	25.000.00 0	12 Paket	50.000.00 0	12 Paket	50.000.00 0	12 Paket	50.000.00 0	12 Paket	50.000.00 0	12 Paket	50.000.00 0	60 Paket	275.000.0 00	Badan Kesbagp ol	Kab.Ta njab Barat
			8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU yang disediakan	24 Dokume n	24 Doku men	7.000.000	24 Doku men	7.000.000	24 Doku men	7.000.000	24 Doku men	7.000.000	24 Doku men	7.000.000	24 Doku men	7.000.000	120 Doku men	42.000.00 0	Badan Kesbagp ol	Kab.Ta njab Barat
			8.01.01.2.06.09	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Lapor an	750.000.0 00	12 Lapor an	750.000.0 00	12 Lapor an	750.000.0 00	12 Lapor an	750.000.0 00	12 Lapor an	750.000.0 00	12 Lapor an	750.000.0 00	60 Lapor an	4.500.000. 000	Badan Kesbagp ol	Kab.Ta njab Barat
			8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Terakomodirnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	-	100%	75.000.00 0	100%	875.000.0 00	100%	375.000.0 00	100%	875.000.0 00	100%	875.000.0 00	100%	3.075.000. 000	Badan Kesbag pol	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	-	3 unit Kend Roda 2	75.000.000	3 unit Kend Roda 2	75.000.000	3 unit Kend Roda 2	75.000.000	3 unit Kend Roda 2	75.000.000	3 unit Kend Roda 2	75.000.000	12 unit Kend Roda 2	375.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	-	-	-	-	-	1 unit Kend Roda 4	500.000.000	-	-	1 unit Kend Roda 4	500.000.000	1 unit Kend Roda 4	500.000.000	2 unit Kend Roda 4	1.500.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	6 Unit	200.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 unit PC, 4 Unit Laptop	200.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	5 unit	200.000.000	5 unit	200.000.000	5 unit	200.000.000	5 unit	200.000.000	15 unit	800.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	74.000.000	100%	134.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	788.000.000	Badan Kesbag pol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	60 Laporan	28.000.000	Badan Kesbag pol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	100.000.000	60 Laporan	540.000.000	Badan Kesbag pol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	6 Laporan	6 Laporan	30.000.000	6 Laporan	30.000.000	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	40.000.000	6 Laporan	40.000.000	30 Laporan	220.000.000	Badan Kesbag pol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	367.500.000	100%	367.500.000	100%	497.500.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	2.732.500.000

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan an biaya pemeliharaan an dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit 250.000.000	18 Unit 250.000.000	18 Unit 250.000.000	18 Unit 350.000.000	18 Unit 350.000.000	18 Unit 350.000.000	18 Unit 350.000.000	18 Unit 350.000.000	18 Unit 350.000.000	18 Unit 350.000.000	18 Unit 350.000.000	18 Unit 1.900.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat		
			8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan an , Biaya Pemeliharaan an , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	1 Unit 35.000.000	1 Unit 35.000.000	1 Unit 50.000.000	1 Unit 50.000.000	1 Unit 50.000.000	1 Unit 50.000.000	1 Unit 50.000.000	1 Unit 50.000.000	1 Unit 50.000.000	1 Unit 50.000.000	1 Unit 270.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat			
			8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan an Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit 5.000.000	1 Unit 5.000.000	1 Unit 2.500.000	1 Unit 5.000.000	1 Unit 5.000.000	1 Unit 5.000.000	1 Unit 5.000.000	1 Unit 5.000.000	1 Unit 5.000.000	1 Unit 27.500.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat				
			8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 unit	10 Unit 35.000.000	10 unit 35.000.000	10 unit 35.000.000	10 unit 35.000.000	10 unit 35.000.000	10 unit 35.000.000	10 unit 35.000.000	10 unit 35.000.000	10 unit 35.000.000	10 unit 210.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat				

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	5 unit	5 unit	7.500.000	5 unit	7.500.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	55.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	35.000.000	1 Unit	35.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	270.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
Mewujudkan Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik			8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa yang meningkat pemahamannya	100%	100%	4.645.000.000	100%	4.645.000.000	100%	4.665.000.000	100%	4.645.000.000	100%	4.645.000.000	100%	4.645.000.000	100%	27.890.000.000	Badan Kesbagpol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Pembinaan idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI	100%	100%	4.645.000.000	100%	4.645.000.000	100%	4.665.000.000	100%	4.645.000.000	100%	4.645.000.000	100%	4.645.000.000	100%	27.890.000.000	Badan Kesbagpol	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasa ran OPD	Indik ator Sasar an	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.02.2.01.000 1	Penyusuna n Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaa n, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa n , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaa n	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	5 Dok	5 Dok	30.000.00 0	5 Dok	30.000.00 0	5 Dok	30.000.00 0	5 Dok	30.000.00 0	5 Dok	30.000.00 0	5 Dok	30.000.00 0	20 dok	180.000.0 00	Badan Kesbagp ol	Kab.Ta njab Barat
			8.01.02.2.01.000 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaa n, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa n , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaa n	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa , Pembauran Kebangsaan, Bhineeka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Dok	2 dok	25.000.00 0	2 dok	25.000.00 0	2 dok	25.000.00 0	2 dok	25.000.00 0	2 dok	25.000.00 0	2 dok	25.000.00 0	10 dok	150.000.0 00	Badan Kesbagp ol	Kab.Ta njab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	100 orang	2.000.000.000	250 orang	2.000.000.000	300 Org	2.000.000.000	300 Org	2.000.000.000	300 Org	2.000.000.000	300 Org	2.000.000.000	1250 orang	12.000.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	25 orang	25 orang	55.000.000	25 orang	55.000.000	30 orang	75.000.000	25 orang	55.000.000	25 orang	55.000.000	25 orang	55.000.000	125 orang	350.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasa ran OPD	Indik ator Sasar an	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaa n Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaa n, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaa n , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaa n	Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	2 Laporan	2 Lapor an	55.000.00 0	2 Lapor an	55.000.00 0	2 Lapor an	55.000.00 0	2 Lapor an	55.000.00 0	2 Lapor an	55.000.00 0	2 Lapor an	55.000.00 0	10 Lapor an	330.000.0 00	Badan Kesbagp ol	Kab.Ta njab Barat
			8.01.02.2.01.0006	Pembentuk an dan Penumbuh an Karakter Keluarga melalui peningkata n kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayata n dan pengamala n Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyara kat, berbangsa dan bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	75 Keluarga	75 Kelua rga	80.000.00 0	75 Kelua rga	80.000.00 0	75 Kelua rga	80.000.00 0	75 Kelua rga	80.000.00 0	75 Kelua rga	80.000.00 0	75 Kelua rga	80.000.00 0	375 Kelua rga	480.000.0 00	Badan Kesbagp ol	Kab.Ta njab Barat
			8.01.02.2.01.0008	Pembentuk an Paskibraka	Jumlah Paskibraka	200 Org	200 orang	2.000.000 .000	200 Org	2.000.000 .000	200 Org	2.000.000 .000	200 Org	2.000.000 .000	200 Org	2.000.000 .000	200 Org	2.000.000 .000	800 Org	12.000.00 0.000	Badan Kesbagp ol	Kab.Ta njab Barat

Tujuan	Sasa ran OPD	Indik ator Sasar an	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)
			8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibra Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibra Duta Pancasila	100 Org	100 Org	150.000.000	100 Org	150.000.000	100 Org	150.000.000	100 Org	150.000.000	100 Org	150.000.000	100 Org	150.000.000	150	900.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibra Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibra Duta Pancasila	0%	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	100.000.000	32 Lap	600.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibra Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibra Duta Pancasila	100 Org	100 Org	150.000.000	100 Org	150.000.000	100 Org	150.000.000	100 Org	150.000.000	100 org	150.000.000	100 org	150.000.000	500 Org	900.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat dan parpol	100%	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.920.000.000	100%	2.920.000.000	100%	2.875.000.000	100%	2.875.000.000	100%	16.890.000.000	Badan Kesbagpol	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	PersentaseTerlaksananya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	2.650.000.000	100%	2.650.000.000	100%	2.920.000.000	100%	2.920.000.000	100%	2.875.000.000	100%	2.875.000.000	100%	16.890.000.000	Badan Kesbag pol	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program kerja di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	Tersusunnya Program kerja di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	3 Dok	5 Dok	35.000.000	5 Dok	35.000.000	4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	22 dok	230.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	Jumlah Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	5 Dok	5 dok	25.000.000	5 dok	25.000.000	4 dok	30.000.000	4 dok	30.000.000	4 dok	30.000.000	4 dok	30.000.000	22 dok	170.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan peran demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	700 orang	700 orang	2.300.000.000	700 orang	2.300.000.000	700 orang	2.500.000.000	700 orang	2.500.000.000	700 orang	2.500.000.000	700 orang	2.500.000.000	3.500 Org	14.600.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah.	30 orang	30 orang	45.000.000	30 orang	45.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	5.000.000	30 orang	5.000.000	150 orang	200.000.000	Badan Kesbangpol	Kab.Tanjat Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	Jumlah Laporan Hasil Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	4 Laporan	4 Laporan	245.000.000	4 Laporan	245.000.000	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	300.000.000	4 Laporan	300.000.000	20 Laporan	1.690.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang diberdayakan	100%	100%	290.000.000	100%	300.000.000	100%	360.000.000	100%	380.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.130.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	100%	290.000.000	100%	300.000.000	100%	360.000.000	100%	380.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	2.130.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang pendaftaran ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	40.000.000	4 Dok	40.000.000	4 Dok	45.000.000	4 Dok	50.000.000	4 Dok	50.000.000	20 Dokumen	255.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	4 Dokumen	4 Dok	40.000.000	4 Dok	40.000.000	4 Dok	40.000.000	4 Dok	45.000.000	4 Dok	50.000.000	4 Dok	50.000.000	20 Dokumen	265.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	100 orang	100 orang	150.000.000	100 orang	150.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	1.100.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	25 orang	25 orang	35.000.000	25 orang	35.000.000	25 orang	40.000.000	25 orang	45.000.000	25 orang	50.000.000	25 orang	50.000.000	125 orang	255.000.000	Badan Kesbagpol	Kab. Tanjab Barat
			8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	4 Laporan	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	50.000.000	20 Laporan	255.000.000	Badan Kesbagpol	Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)
			8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Peserta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosbud yang meningkat pemahamannya	100%	100%	835.000.000	100%	835.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	5.550.000.000	Badan Kesbag pol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan	100%	100%	835.000.000	100%	835.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	970.000.000	100%	5.550.000.000	Badan Kesbag pol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasa ran OPD	Indik ator Sasar an	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 dok	70.000.000	4 dok	70.000.000	4 dok	70.000.000	4 dok	70.000.000	20 dok	400.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	70.000.000	20 Dokumen	400.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	150 Orang	150 Orang	600.000.000	150 Orang	600.000.000	150 Orang	700.000.000	150 Orang	700.000.000	150 Orang	700.000.000	150 Orang	700.000.000	850 orang	4.000.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	50 orang	50 orang	55.000.000	50 orang	55.000.000	50 orang	60.000.000	50 orang	60.000.000	50 orang	60.000.000	50 orang	60.000.000	750 orang	350.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	4 Laporan	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	70.000.000	20 Laporan	400.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat
			8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	1.125.000.000	100%	1.215.000.000	100%	1.410.000.000	100%	1.410.000.000	100%	1.410.000.000	100%	1.410.000.000	100%	7.980.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	1.125.000.000	100%	1.215.000.000	100%	1.410.000.000	100%	1.410.000.000	100%	1.410.000.000	100%	1.410.000.000	100%	7.980.000.000	Badan Kesbag pol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)
			8.01.06.2.01.0001	Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000	5 Dokumen	75.000.000	4 Dok	80.000.000	4 Dok	80.000.000	4 Dok	80.000.000	4 Dok	80.000.000	22 Dokumen	470.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen	70.000.000	20 Dokumen	400.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanj. Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	150 orang	150 orang	500.000.000	150 orang	500.000.000	150 orang	600.000.000	150 orang	600.000.000	150 orang	600.000.000	150 orang	600.000.000	750 orang	3.400.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	75 orang	75 orang 80.000.000	75 orang 80.000.000			50 orang 80.000.000		75 orang 80.000.000	75 orang 80.000.000		75 orang 80.000.000		375 orang	480.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat	

Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2025)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penang gung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2025)		Tahun- 2 (2026)		Tahun-3 (2027)		Tahun- 4 (2028)		Tahun- 5 (2029)		Tahun- 6 (2030)					
							Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			(19)	(20)	(21)	(22)	
			8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	4 Laporan	4 Laporan 60.000.000	4 Laporan 150.000.000	4 Laporan 80.000.000	4 Laporan 80.000.000	4 Laporan 80.000.000	4 Laporan 80.000.000	4 Laporan 80.000.000	4 Laporan 80.000.000	4 Laporan 80.000.000	4 Laporan 80.000.000	20 Laporan 530.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat			
			8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen 350.000.000	4 Dokumen 350.000.000	4 Dokumen 500.000.000	4 Dokumen 500.000.000	4 Dokumen 500.000.000	4 Dokumen 500.000.000	4 Dokumen 500.000.000	4 Dokumen 500.000.000	4 Dokumen 500.000.000	20 Dokumen 2.700.000.000	Badan Kesbagpol	Kab.Tanjab Barat				

4.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2026

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai wujud Komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 . Indikator kinerja tersebut terdapat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	$CPIK = \frac{\text{Jumlah Peserta yang mengikuti Penguatan Ideologi dan Karakter}}{\text{Jumlah Peserta yang Pernah Mengikuti Penguatan Ideologi dan Karakter Bangsa}} \times 100$	50%	71.42%	78.57%	85.71 %	88%	100%	
2.	Persentase Pendidikan Politik pada kader Partai Politik	Persen	$PP = \frac{\text{Jumlah partai yang telah mengikuti Pendidikan Politik}}{\text{Jumlah partai politik}} \times 100$	40%	50%	70%	80%	90%	100%	
3.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Persen	$POA = \frac{\text{Jumlah Ormas Aktif}}{\text{Jumlah Ormas Terdaftar}} \times 100$	45%	65%	70%	80%	90%	100%	
4.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Angka	$KUB = \frac{\text{Jumlah Dimensi Toleransi KUB} + \text{Dimensi Kerjasama KUB} + \text{Dimensi Kesetiaan KUB}}{\text{Jumlah Dimensi KUB}} \times 100$	69,3	69,4	69,5	69,7	70	70,60	
5.	Persentase Konflik sosial yang di selesaikan	Persen	$PKS = \frac{\text{Jumlah Konflik yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Total Konflik yang terjadi}} \times 100$	30%	50%	60%	70%	80%	100%	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Pelayanan Urusan Kesekretariatan

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.10	88	90	91	93	95	
2..	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	69.38	81	85	87	88	90	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Orang	50	75	110	150	185	200	
2.	Jumlah Peserta Kegiatan Pendidikan Politik bagi masyarakat dan Pemilih Pemula	Orang	75	75	75	75	75	75	
3.	Jumlah Peserta kegiatan dialog antar umat beragama	Orang	91	120	150	180	200	250	

Tabel
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan Paskibraka Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Pengakatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	
2.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan etika serta budaya Politik	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan di Bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu / pilkada serta pemantauan situasi politik	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangan etika serta budaya Politik	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendidikan politik, etika budaya politik peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilu / pilkada serta pemantauan situasi politik	
2.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya Ketertiban organisasi kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
3.	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat	Pelaksanaan kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas KUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	
4.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselesaikan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen , pemantauan orang asing , tenaga kerja asing, dan lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Meningkatnya Penanganan Konflik sosial yang diselesaikan	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta untuk mendukung pencapaian visi Kepala Daerah “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI” sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator kinerja utama yang akan dicapai selama periode perencanaan. Penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan isu-isu strategis aktual di bidang politik dalam negeri, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, deteksi dan pencegahan dini konflik sosial, pengawasan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan partisipasi politik masyarakat yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Badan Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki acuan dan komitmen yang sama dalam melaksanakan tugas secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Akhirnya, Renstra ini akan menjadi instrumen pengendali, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta akan dikaji dan disesuaikan apabila terdapat perubahan kebijakan strategis, regulasi, atau dinamika pembangunan yang mempengaruhi pelaksanaannya di masa mendatang

Kuala Tungkal,

2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Drs. ENCEP JARKASIH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701201 199009 1 001

